

KOMUNIKASI PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA POMBEYOHA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

¹⁾Nurna Nengsi, ²⁾Edy Basri, ³⁾Syahrudin

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

Email: ¹⁾nengshyn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk komunikasi partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pombeyoha, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala desa, kepala dusun, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif masyarakat telah terwujud melalui empat indikator utama, yaitu keterlibatan aktif, dialog dan kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta kesetaraan dalam komunikasi. Meskipun sebagian masyarakat sudah berperan aktif dalam memberikan aspirasi dan ide pembangunan, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman mekanisme perencanaan dan dominasi kelompok tertentu dalam forum musyawarah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi partisipatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunikasi Partisipatif; Perencanaan Pembangunan; Partisipasi Masyarakat; Desa Pombeyoha

Abstract

This research aims to analyze the forms of participatory communication practiced by the community in the development planning process of Pombeyoha Village, Ladongi District, East Kolaka Regency. The study employs a descriptive qualitative approach using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. The informants include the village head, hamlet heads, members of the Village Consultative Body (BPD), and residents involved in the village development planning meetings (Musrenbangdes). The findings indicate that participatory communication is reflected through four key indicators: active involvement, dialogue and collaboration, community empowerment, and equality in communication. Although some residents actively express their ideas and opinions, several challenges remain, such as limited understanding of planning mechanisms and dominance by certain groups in discussions. This study highlights the importance of strengthening participatory communication as a community empowerment strategy to ensure transparent, inclusive, and sustainable village development.

Keywords: Participatory Communication; Development Planning; Community Empowerment; Pombeyoha Village

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia. Dengan komunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari (Irfaniniswan et al., 2024). Komunikasi dasarnya merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek (akibat) tertentu (Wulandari et al., 2024). Konsep komunikasi partisipatif berkembang sebagai respons terhadap pendekatan komunikasi pembangunan yang sebelumnya bersifat *top-down* dan elitis. Pada awalnya, komunikasi pembangunan berfokus pada penyebaran informasi dari pemerintah atau lembaga pembangunan kepada masyarakat dengan harapan akan terjadi perubahan perilaku secara linier. Namun, pendekatan ini dianggap gagal menjawab kebutuhan dan realitas sosial masyarakat lokal.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang luar biasa telah membuka babak baru dalam kehidupan masyarakat modern guna mendapatkan informasi secara otonom. Hampir setiap orang memiliki akses terhadap informasi-informasi tersebut dimanapun di dunia ini (Syahrudin, 2020). Perkembangan teknologi digital juga turut memperkuat pendekatan partisipatif, memungkinkan warga untuk lebih mudah mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, dan berjejaring secara langsung dengan pengambil kebijakan. Di Indonesia, pendekatan komunikasi partisipatif semakin diakui dalam kerangka pembangunan desa pasca undang-undang desa No. 6 Tahun 2014, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga dalam setiap tahap pembangunan.

Komunikasi partisipatif memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, komunikasi partisipatif juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat, sehingga program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif individu, kelompok atau komunitas dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, atau evaluasi suatu program atau kegiatan yang berdampak pada mereka. Partisipasi ini mencerminkan peran masyarakat dalam pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini harus melibatkan semua pihak, harus bekerja sama dan bertanggungjawab agar semua tujuan yang telah direncanakan dan disepakati sebagai hasil dari keputusan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Program pembangunan desa, pemerintah desa harus mengikut sertakan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya dapat menikmati hasil pembangunan saja, akan tetapi masyarakat pun ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai dengan target atau tidak. Disamping itu agar terciptanya suasana kebersamaan dan keterbukaan, sehingga berharap agar pembangunan yang sudah direalisasikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan (Hakim, 2017).

Desa Pombeyoha, yang terletak di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, merupakan salah satu wilayah yang sedang melaksanakan pembangunan dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) sebagai forum utama untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum ini masih bervariasi. Beberapa masyarakat aktif menyampaikan pendapat, sementara yang lain cenderung pasif atau bahkan tidak hadir.

Faktor-faktor seperti keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan, dan dominasi kelompok tertentu sering menjadi kendala dalam

mewujudkan perencanaan yang benar-benar partisipatif. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis partisipatif untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Pombeyoha terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam meningkatkan keterlibatan tersebut.

Komunikasi partisipatif awalnya diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar di Amerika Latin pada tahun 1978. Seorang intelektual Amerika bernama Paulo Freire mencetuskan konsep komunikasi partisipatif bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kata-katanya, baik secara individual ataupun bersama-sama (Muchtar, 2016).

Komunikasi partisipatif menurut Paulo Freire adalah proses dialogis yang menekankan keterlibatan aktif, kesetaraan, dan pemberdayaan individu dalam suatu komunitas. Konsep ini berakar pada teori pendidikan kritis Freire, yang bertujuan untuk membebaskan individu dari ketidakadilan melalui pendidikan yang membangun kesadaran kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus meneliti sesuai dengan fakta di lapangan selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Zakariah et al., 2020).

Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi objek dari penelitian. Ini mencakup partisipan wawancara, responden survei, anggota komunitas, atau populasi yang diobservasi. definisi subjek penelitian mencakup pemahaman tentang siapa atau apa yang akan diteliti (Nartin et al., 2024). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang merupakan orang yang berpengaruh dalam Desa Pombeyoha dan dapat memberikan informasi yang relevan. Informan yang dipilih dari warga desa sebanyak 10 orang.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan tertentu (Asari et al., 2023). Pertimbangan ini berupa pemilihan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sehingga nantinya penelitian yang dilakukan dapat berjalan lebih mudah. Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Komunikasi partisipatif awalnya diperkenalkan pertama kali dalam sebuah seminar di Amerika Latin pada tahun 1978. Seorang intelektual Amerika bernama Paulo Freire mencetuskan konsep komunikasi partisipatif bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kata-katanya, baik secara individual ataupun bersama-sama. Komunikasi partisipatif menurut Paulo Freire adalah proses dialogis yang menekankan keterlibatan aktif, kesetaraan, dan pemberdayaan individu dalam suatu komunitas. Konsep ini berakar pada teori pendidikan kritis Freire, yang bertujuan untuk membebaskan individu dari ketidakadilan melalui pendidikan yang membangun kesadaran kritis (Muchtar, 2016).

Bentuk komunikasi partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pombeyoha dapat dikatakan proses kerjasama yang cukup baik. Dikarenakan pemerintah desa memberi kebebasan atau hak berpendapat kepada semua kalangan sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang telah dikemukakan

oleh Paulo Freire bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan diskusi dengan melibatkan semua kalangan masyarakat agar setiap pendapat yang dilontarkan dapat dipertimbangkan sebaik mungkin, mana pendapat yang lebih efektif. Perencanaan pembangunan membutuhkan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat.

Keterlibatan Aktif

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat secara berkeadilan. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan setiap program pembangunan.

keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sudah berjalan, meskipun masih terdapat hambatan yang perlu dibenahi. Keterlibatan tersebut tampak dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai forum musyawarah desa, seperti musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), musyawarah khusus, hingga musyawarah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui forum-forum tersebut, masyarakat berkesempatan memberikan masukan terkait pembangunan baik berupa pekerjaan fisik seperti jalan, drainase, dan deker, maupun program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama pemerintah desa juga melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hingga pemuda, sehingga partisipasi masyarakat bersifat berlapis. Akan tetapi, keterlibatan aktif ini belum sepenuhnya merata karena masih ada hambatan, baik psikologis maupun struktural.

Hambatan psikologis berupa rasa malu, takut salah, dan kurang percaya diri, terutama pada ibu-ibu dan pemuda, sedangkan hambatan struktural disebabkan oleh keterbatasan waktu masyarakat yang bekerja di sawah, kebun, atau memiliki kesibukan lain sehingga tidak dapat selalu hadir. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong keterlibatan aktif, seperti memberikan undangan secara langsung ke rumah warga, melakukan pengumuman di balai desa dan masjid, memanfaatkan media sosial desa, serta menciptakan suasana musyawarah yang santai agar masyarakat lebih berani menyampaikan pendapat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat Desa Pombeyoha telah terbangun dan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan desa, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara merata.

Dialog dan Kolaborasi

Komunikasi partisipatif dapat diwujudkan dalam bentuk dialog. Esensi dari sebuah dialog adalah pengakuan dan penghormatan terhadap pembicara lain. Setiap pembicara merupakan subjek yang otonom, bukan sebagai obyek komunikasi serta memiliki hak yang sama untuk berbicara dan untuk didengar, mengharapkan suara mereka tidak ditekan atau digabung dengan suara hati. Kolaborasi dalam pembangunan adalah proses interaksi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam komunikasi partisipatif, kolaborasi berfokus pada dialog yang terbuka dan berbasis kesetaraan, bukan hubungan hierarkis atau instruktif.

Dalam dialog dan kolaborasi, aparat desa beserta masyarakat saling bekerja sama dalam perencanaan pembangunan.. Seperti halnya, diskusi ringan ataupun mengadakan rapat dengan melibatkan semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali agar mereka juga dapat

menyampaikan pendapat atau usulan. Namun, sebagian masyarakat masih ada merasa malu mengungkapkan pendapatnya, entah takut disalahkan atau merasa tidak memiliki hak berbicara. Oleh karena itu, aparat desa terus memberi peluang berbicara dan berusaha mendorong masyarakat untuk menyampaikan apapun pendapat mereka.

Komunikasi partisipatif dalam pembangunan desa telah terwujud melalui forum musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta diskusi informal yang dilakukan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu. Musyawarah ini menjadi sarana dialog terbuka yang memungkinkan setiap warga menyampaikan aspirasi, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan dominasi dari kelompok tertentu seperti tokoh agama atau orang tua kampung yang lebih cepat didengar. Pemerintah desa dinilai cukup terbuka dalam menerima seluruh saran, meskipun tidak semua usulan dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran sehingga perlu diprioritaskan sesuai kebutuhan mendesak.

Hambatan partisipasi yang ditemui antara lain rasa malu, takut salah, kurang percaya diri, dan kesibukan masyarakat yang menghalangi keterlibatan penuh. Meski demikian, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa BPD berperan aktif sebagai fasilitator dan jembatan komunikasi agar suara warga tetap tersampaikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Dari perspektif teori komunikasi partisipatif Paulo Freire, dialog di Pombeyoha mencerminkan pola komunikasi horizontal, meskipun belum sepenuhnya egaliter, karena masih ada kelompok yang pasif. Namun demikian, perbedaan pendapat dalam musyawarah justru dipandang sebagai hal yang wajar dan memperkaya proses pengambilan keputusan sehingga menghasilkan kesepakatan yang lebih matang. Dengan demikian, dialog dan kolaborasi di Desa Pombeyoha tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi wadah partisipasi kolektif, memperkuat kebersamaan, dan memastikan pembangunan desa lebih tepat sasaran serta berorientasi pada kepentingan bersama seluruh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”*

Dalam teori komunikasi partisipatif, disebutkan pula salah satu indikator pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran aktif berlangsungnya perencanaan pembangunan yang efisien dan tertata. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini yakni mengedepankan nilai-nilai sosial. Pemerintah desa maupun masyarakat meyakini nilai-nilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan. Nilai-nilai sosial tersebut meliputi gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan dengan diterapkan nilai sosial komunuasi dapat terjalin secara terbuka dan adil.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Pombeyoha terwujud melalui penerapan nilai-nilai sosial lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan yang menjadi landasan utama dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, dan orang yang dituakan selalu dilibatkan dalam setiap rapat sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan nilai lokal.

Masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, melainkan ikut berperan aktif melalui kerja bakti, pengusulan ide, serta keterlibatan generasi muda dalam musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berjalan secara kolektif dan berkesinambungan, meskipun masih ditemui hambatan berupa rasa malu, takut salah, rendahnya kepercayaan diri, dan keterbatasan waktu warga. Namun, hambatan tersebut

perlahan dapat diatasi melalui strategi komunikasi partisipatif yang santai, inklusif, dan mendekatkan aparat desa dengan masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di Desa Pombeyoha bukan hanya memperkuat partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki, menjaga identitas sosial-budaya, serta membangun kemandirian warga dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Kesetaraan Dalam Komunikasi

Kesetaraan dalam komunikasi berarti memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam pendekatan ini pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pihak berwenang, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Sejalan dengan teori komunikasi partisipatif oleh Paulo yang menyebutkan tentang keterkaitan kesetaraan dengan perencanaan pembangunan, dimana kesetaraan mencakup kesempatan yang sama dimiliki oleh semua masyarakat, bahkan pemerintah desa mengutamakan kebutuhan masyarakat, seperti pada perencanaan pembangunan akan diadakan musyawarah desa. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan keluhan.

Kesetaraan dalam komunikasi terwujud melalui keterbukaan informasi, transparansi, dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Pemerintah desa tidak hanya mengandalkan forum formal seperti musyawarah, tetapi juga aktif menyampaikan informasi secara langsung melalui undangan rumah ke rumah, pengumuman di masjid, hingga pemanfaatan media sosial resmi desa. Selain itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun kritik baik secara formal di rapat desa maupun secara informal di kantor desa atau dalam percakapan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan adanya dialog horizontal yang inklusif, di mana semua suara warga dihargai tanpa memandang status sosial maupun latar belakang pendidikan.

SIMPULAN

Dialog dalam musyawarah memungkinkan warga dan pemerintah bersama menentukan prioritas pembangunan, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator agar proses tetap inklusif. Pemberdayaan masyarakat terlibat dalam kerja bakti, pengusulan ide, dan pelibatan generasi muda, serta dukungan tokoh adat dan tokoh agama agar pembangunan tetap selaras budaya lokal, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan kemandirian. Kesetaraan komunikasi terlihat dari keterbukaan dan kesempatan yang sama bagi semua warga melalui pengumuman rumah ke rumah, masjid, dan media sosial desa, serta ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun kritik, sehingga partisipasi meningkat, kepercayaan terbangun, dan legitimasi pemerintah desa diperkuat. Secara keseluruhan, meski terdapat hambatan, komunikasi partisipatif di Desa Pombeyoha telah berjalan efektif dan berpotensi terus meningkatkan partisipasi masyarakat demi pembangunan yang adil, representatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari, A., Sulkarnain, & Hartatik. (2023). *pengantar statistika*.
 Irfaniniswan, Basri, E., & Syahrudin. (2024). *Pola komunikasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit djafar harun kabupaten kolaka utara 1&3*. 2(2), 94–103.
 Muchtar, K. (2016). *PENERAPAN KOMUNIKASI PARTISIPATIF PADA PEMBANGUNAN DI INDONESIA*. 1, 20–32.
 Nartin, Faturrahman, Deni, H. A., Santoso, Y. H., Paharuddin, Suacana, W. G., & Eliyah.

- (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Syahrudin. (2020). PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP EFEKTIVITAS KOMUNIKASI ANTARPRIBADI MAHASISWA. *Ilmu Komunikasi*.
- Wulandari, I., Basri, E., & Kasim, H. S. (2024). *POLA KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN*. 2(2), 279–283.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research and Development (R n D)* (pertama). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.